

PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS DAN INSTITUSIONALISASI PENGADILAN LOKAL YANG BERBASIS BUDAYA

Hermansyah

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Jalan A. Yani (Jalan Sosiologi), Pontianak,
Indonesia, Telp. (0561) 740187, Faximile (0561) 740187.
Email: hermansyah_fh @ yahoo.com

ABSTRACT

Conflict, ethnicity and multicultural matters are natural law, and the conflicts frequently happen are caused by the misunderstanding of the different life objectives, tribe diversity and cultural plurality. In reality, the conflict settlements are often solved through criminal justice system. However, the settlement through the state criminal justice system results in dissatisfaction as it emphasizes more on the procedural justice. People use violence as an expression of their dissatisfaction with the state justice system. In fact there is an institutionalized local justice (customary justice) which can be used to settle conflicts considering that local justice characteristics emphasize more on substantive justice aspects in settling the conflicts and have social basis and base itself on clear cultural based community.

Keywords: conflict, violence, multicultural, criminal justice system and local justice.

I. PENDAHULUAN

Sebuah catatan historis yang cukup mengejutkan telah dilakukan oleh **Affandi** (2004: 1-2) dan **Koentjaraningrat** (1993: 2-3) yang memperlihatkan bahwa konflik antar suku bangsa (etnis) telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Konflik tersebut tidak saja terjadi di negara-negara berkembang atau negara yang sedang dilanda krisis ekonomi, melainkan sama kuatnya menerobos masuk ke dalam kehidupan negara-negara maju yang kehidupan ekonominya tergolong kuat, bahkan konflik juga melanda pada negara-negara yang fondasi kehidupan demokrasinya sudah kokoh. Dan salah satu penyebab konflik tersebut adalah adanya keragaman etnis dan kultural.

Keragaman etnis dan kultural, disatu sisi dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, tetapi disisi lain kemajemukan tersebut memiliki potensi yang besar bagi munculnya konflik-konflik antar etnis (suku), antar daerah, antar agama, antar kelas ekonomi dan Indonesia sangat berpengalaman dalam hal konflik ini.

Khusus di Kalimantan Barat, konflik antar etnis ini dalam sejarahnya sudah dimulai pada tahun 1950 di Samalantan Kabupaten Sambas, Terap-Toho Kabupaten Pontianak (1969), Bodok Kabupaten Sanggau (1976), Sungai Pinyuh Kabupaten